RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BLITAR
Agustus 2024

disperindag.blitarkab.go.id
disperindag@blitarkab.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN I

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-4
1.3. Maksud dan Tujuan I-7
1.4. Sistematika Penulisan I-7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD II-25
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD II-30
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD II-31
2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegatan Masyarakat II-54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III

3.1. Telaahan Usulan Program dan Kegatan Masyarakat III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD III-3
3.3. Program dan Kegiatan III-3

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV

BAB V PENUTUP V

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan dinamika yang ada.

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 terdiri atas 5 Bab yaitu Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu; Tujuan dan Sasaran PD; Rencana Kerja dan Pendanaan PD; dan Penutup. Dokumen ini telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2026 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal maupun semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*), dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Manajemen Distribusi Barang untuk Kemandirian Ekonomi Daerah.

Blitar, 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710403 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan memiliki peran sentral sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan, dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang tersedia, serta memperhitungkan dinamika pembangunan yang ada. Dengan adanya perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan dapat dirumuskan program dan kegiatan yang dikelola secara efektif, efisien, terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga akan bermuara pada hasil pembangunan yang optimal.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), perencanaan jangka menengah untuk 5 tahun (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan perencanaan jangka pendek atau tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja untuk kurun waktu selama 1 (satu) tahun.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yang dijabarkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka

pembangunan daerah tersebut harus disusun oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan, dengan melakukan penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program kegiatan. Hal ini dilakukan untuk menjamin linearitas dokumen perencanaan antar level, baik di tingkat pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 84 ayat (1) disebutkan perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Biltar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka perangkat daerah menyusun dokumen tersebut dan disahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan dengan sebelumnya menyampaikan dokumen tersebut kepada Kepala Bappedalitbang untuk diverifikasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan strategis. Perencanaan strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biltar disusun dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Biltar yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biltar. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biltar Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa **outcome** dan **output** yang akan diwujudkan pada tahun 2025 dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Biltar Tahun 2025, selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Biltar "Terwujudnya Kabupaten Biltar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (***Baldatun, Thoyyibatun, Wa Rabbun Ghofuur***)", **maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biltar me**ngambil peran dan tugasnya pada Misi ke-3 **yaitu "Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas", serta** Misi ke-4 **yaitu** "Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan". Adapun tema pembangunan tahun 2025 adalah "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah".

Selaras dengan tema tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan focus pada prioritas pembangunan sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

a. Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
b. Meningkatnya Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Ditribusi Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun anggaran 2025 direncanakan akan dilaksanakan program-program sesuai Dokumen RKPD 2025 sebagai berikut:

a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P2);
b. Program Pengembangan Ekspor (P2);
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (P2);
d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (P2);
e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (P2);
f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (P2);
g. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (P3);
h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (P3);
i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (P3);
j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (P1)

Beberapa strategi yang akan dilaksanakan guna pencapaian **outcome** sesuai tema pembangunan tahun 2025 adalah :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
b. Penguatan regulasi;
c. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan industri berbasis potensi lokal;
d. Peningkatan penerapan teknologi industri dan standardisasi produk;
e. Peningkatan jangkauan pemasaran bagi produk-produk lokal;
a. Peningkatan sistem informasi industri yang terintegrasi;
b. Peningkatan pengendalian dan pengawasan izin Usaha Industri;
c. Revitalisasi pasar rakyat;
d. Peningkatan iklim persaingan usaha yang sehat antara pasar rakyat, toko tradisional dan ritel;
e. Peningkatan pengawasan distribusi barang, kecukupan ketersediaan barang, dan intervensi pengendalian harga;
f. Peningkatan perlindungan dan layanan konsumen;

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;

15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentari dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.6-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lemberan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 52/D);

29. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai pedoman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan **stakeholders** (pemangku kepentingan) mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal.

Adapun tujuannya adalah:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan program/kegiatan;
b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan/anggaran perangkat daerah;
c. Sebagai acuan evaluasi atas capaian pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan di perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari Tabel Rancana Program dan Kegiatan

BAB. V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Guna mengetahui kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun lalu (tahun 2023) dan proyeksi capaian tahun berjalan (tahun 2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun–tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (prioritas);
b. Program Pengembangan Ekspor (prioritas);
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (prioritas);
d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
g. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada Tabel 2.1. hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disajikan dengan membandingkan target dan realisasi indikator program/kegiatan/sub kegiatan mulai tahun 2023. Dengan diberlakukannya Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tentapat penyesuaian indikator dan target kinerja kegiatan maupun sub kegiatan tahun 2023.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode Renstra tahun 2021-2026, sehingga capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan adalah perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan 2024.

Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut :

a. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (prioritas);
b. Program Pengembangan Ekspor (prioritas);
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (prioritas);
d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
g. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
i. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan terhadap capaian kinerja program kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program Kegiatan

Sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan 10 program, 18 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023, diketahui bahwa 9 kegiatan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, 6 kegiatan melampaui target dan 3 kegiatan yang lain tidak memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 135%.

a. Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Kegiatan yang tidak mencapai target adalah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan Tingkat capaian 97,55%. Karena hingga saat ini belum memungkinkan untuk melakukan penghapusan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga capaian kegiatan tersebut pada tahun 2023 dan 2024 adalah 97,55%.

Kegiatan Pengangkutan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (53,84%) dan Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang (46,62%).

b. Kegiatan yang Dapat Mencapai Target

Kegiatan yang dapat mencapai target sebanyak 9 kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya (B2), Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan B2 di Tingkat Kabupaten, Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Bapokting serta Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi serta semua kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kecuali Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

c. Kegiatan yang Melampaui Target

Kegiatan yang melampaui target sebanyak 6 kegiatan yaitu Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan capaian kinerja 250%, Penyelenggaraan Promosi Dagang (275%), Pelaksanaan Promosi, Pemasaran Produk Dalam Negeri (166,67%), Penyusunan dan Evaluasi RPIK (110%), Penerbitan IUI, IPUI, IUKI (200%), dan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten dapat melakukan fasilitasi 537,5% dari target yang ditetapkan.

d. Faktor-Faktor Penyebab Tercapai/Tidak Tercapai/Melebihi Target Kinerja Program Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

  Capaian yang tidak sesuai target yang ditetapkan karena pelaksanaan Diklat yang diikuti oleh beberapa ASN durasi waktunya relative lama, sehingga anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai 5 orang ASN dari 7 orang yang direncanakan.
- Pada tahun 2023 semua pengadaan barang milik daerah telah 100% tepat sesuai yang direncanakan. Sedangkan pada pemeliharaan barang milik daerah dari total 2.156 unit barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam kondisi baik sebanyak 2.104 unit (97,59%), di bawah target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena 39 unit (1,81%) barang milik daerah dalam keadaan kurang baik dan 13 unit (0,61%) rusak berat.

- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan. Program ini terealisasi sesuai yang telah direncanakan sebesar 100%, dimana jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan berjumlah 10 rekomendasi dari 10 permohonan yang masuk.
- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, capaian indikator kegiatan ini adalah jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina, pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 89 orang, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 85 orang. Hal ini disebabkan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyesuaian tarif retribusi yang pada awalnya hanya ditujukan kepada petugas pemungut (THL), namun pada saat pelaksanaan kegiatan dinas perlu untuk mengikutsertakan para pengelola/mantri pasar dari 13 pasar rakyat.

e. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Berbagai factor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja program kegiatan berimplikasi pada pencapaian target renja yang akhirnya berdampak pada pencapaian target Renstra PD yang ditetapkan pada tahun berjalan.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tersebut

Beberapa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah melampaui target Renstra pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk mereviu target kinerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2024 serta penyesuaian target kinerja tahun 2025.

Secara terperinci Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kab Bo dan Sasaran Renstra PD sampai dengan Tahun 2024
Kabupaten Bima

Urusan Wajib : Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan

Kode				Uraian Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Indikator Misi/ Program/ Sasaran/ Kebijakan/ Tujuan/ Kegiatan	Target Kinerja pada Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun awal Renstra	Kondisi Kinerja dan Kebutuhan Kegiatan pd Tahun awal	Target Kinerja dan Kebutuhan Kegiatan Tahun Lima Tahun Renstra			Target Kinerja dan Kegiatan Pada Tahun akhir	Kondisi Kinerja dan Kebutuhan Kegiatan pada Akhir Tahun Renstra		
								Target Kinerja Program dan Kebutuhan Kegiatan Tahun awal	Kondisi Kinerja Program dan Kebutuhan Kegiatan pd Tahun awal	Target Kinerja dan Kebutuhan Kegiatan pd Tahun akhir		Kondisi Kinerja Program dan Kebutuhan Kegiatan pada Akhir Tahun Renstra		Target Kinerja dan Kebutuhan Kegiatan Renstra PD pada akhir Tahun Renstra
				1		2		3			4	5		6
B				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PILIHAN										
B	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
B	1	a		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	0	Persen	65	Persen	0	Persen	0,00	Persen	80%	80	Persen	0,00	Persen	0,00 (0%)
					Rata-rata Pelaksanaan Kegiatan Kinerja Kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	0,00	Persen	65,00	Persen	80	Persen	80,70	Persen	0,00	0,00	Persen	80,70	Persen	0,00 (0%)

Kode					Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Hasil Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kerangka Pendanaan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun 2023	Program dan Kegiatan Tahun 2024 (Rp)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun Berjalan (s.d. Triwulan ...)	
									Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Capaian Realisasi (%)			
1					2	3	4	5	6	7	8=7:6	9	10	11

Kode					Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Hasil Kegiatan/ Keluaran Sub Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan pada Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (T-1) s.d. Tahun			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024		Realisasi Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2024		Target Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan pada Tahun 2025
							Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Kinerja pada Akhir Tahun 2023	Realisasi Anggaran pada Akhir Tahun 2023	Target Kinerja Realisasi Kinerja pada Akhir Tahun 2022	Realisasi Anggaran pada Akhir Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi Kinerja pada Akhir Tahun 2024	Anggaran	Target Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan pada Tahun 2025
1					2	3	4		5		6		7	8=(5/7)x100		9		10=(9/4)x100
X	XX	X	X.XX	X	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kewenangan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Kewenangan Daerah	1000	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	100%	800	Dokumen	80%	Dokumen	10
X	XX	X	X.XX	X	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	100%	10	Dokumen	80	Dokumen	10
X	XX	X	X.XX		Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase [illegible] yang Terlaksana Administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100%	100	Persen	100	Persen	100
X	XX	X	X.XX	X	Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/ Kota dan Forum Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/ Kota dan Forum Lintas Perangkat Daerah	10	Rapat	1	Rapat	1	Rapat	1	100%	10	Rapat	10	Rapat	10
X	XX	X	X.XX		Koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan daerah	Persentase [illegible] yang Terlaksana Koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan daerah	10	Persen	100	Persen	100	Persen	100	100%	100	Persen	100	Persen	100

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan serta Realisasinya pada Tahun 2022		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan pada Tahun 2024			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan pada Perubahan Tahun Berjalan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Rancangan Awal RPJMD Berikutnya (Tahun 2025)
							Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	
1					2	3	4		5		6		7	8		9		10

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023			Target Realisasi Keuangan Tahun 2023		Realisasi Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerha dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2023 (Rupiah)
											Target Kinerja Keuangan Setelah Revisi		Realisasi Kinerja Keuangan Setelah Revisi		Capaian Realisasi (%)				
1					2	3	4		5		6		7		8=7/5		9		10	

Kode					Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2025)	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2025	Target Kinerja Program dan Kegiatan pada Perubahan Tahun 2026			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pergeseran Tahun Berjalan	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sd Triwulan Pergeseran Tahun Berjalan	
									Target Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2026	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun 2026	Capaian Realisasi pada Tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sd Triwulan Pergeseran (RPK)	Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sd Triwulan Pergeseran (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7:6	9	10=5:4	11=10:4
x	x	x	x	x			xxx	xxx	xx	xx	xx%	xx	xx	xx%
x	x	x	x	x			xx	xx	xx	xx	xx%	xx	xx	xx%
xx	x	x	x				xxx	xxx	xxx	xxx	xx%	xxx	xxx	xx%
x	x	x	x	x			x	x	x	x	xx%	x	x	xx%

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Output Kegiatan (output)	Target Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) yang akan dicapai pada tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan tahun 2023			Target Kinerja dan Anggaran Rancangan Awal Perubahan Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Akhir Tahun 2023 (%)
1					2	3	4		5		6		7	8=7:6	9		10	11=10:9

Kode					Urusan Pemerintahan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun Lalu (Tahun 2022)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025
							Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Realisasi Kinerja	Realisasi Pendanaan	Target Kinerja	Realisasi Pendanaan	Capaian Realisasi (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Pendanaan	Target Kinerja
1					2	3	4		5		6		7=5/3 x 100	8	9=5/8 x 100		10=9+(9-6)
X	X	X	X		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
X	X	X	X	X	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Program (outcome) dan Kegiatan	Target Kinerja sebelum Perubahan Anggaran (Capaian Tahun Berjalan sebelum Perubahan)	Realisasi Target Kinerja Pada Triwulan yang Dianalisis (Capaian Tahun Berjalan sampai dengan Triwulan yang dianalisis)	Target Kinerja Setelah Perubahan Anggaran (Capaian Tahun Berjalan)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan yang Dianalisis dan Realisasi Kerangka Pendanaan		Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kerangka Pendanaan sampai dengan Triwulan yang dianalisis	
									Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Target Kinerja (%)		Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Target Kinerja (%)	Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kerangka Pendanaan (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=7/6 x 100	9	10	11=10/9 x 100	12=11/5 x 100	13=(11+8)/2

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Output Kegiatan	Target Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Berjalan (n)	Realisasi Target Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran yang Akan Dicapai Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran yang Akan Dicapai Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran yang Belum Tercapai pada Tahun Berjalan (n)		Target Kinerja dan Anggaran yang Akan Dicapai pada Tahun Berjalan (n+1)
									Target Kinerja	Anggaran	Capaian Kinerja (%)	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja	Anggaran	Target Kinerja
1					2	3	4		5		6	7		8		9
X	XX	XX			**Program Pemenuhan Mutu Barang Standar Perdagangan**	**Tingkat pengaduan dan pengaduan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan**	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
X	XX	XX	XX		Pengawasan dan Pengendalian Barang Standar Perdagangan	Jumlah barang yang diawasi dan pengendalian sesuai standar perdagangan	127	Jenis	134	Jenis	127	127	Jenis	127	Jenis	127
X	XX	XX	XX	X	Pengawasan Barang Standar Perdagangan	Jumlah barang yang diawasi sesuai standar perdagangan	100	Jenis	134	Jenis	1	0	Jenis	100%	100	Jenis	100	Jenis	100 %
X	XX	XX	XX	X	Pengawasan Barang Standar Perdagangan	Jumlah Barang yang diawasi sesuai standar perdagangan	100	Jenis	134	Jenis	100	100	Jenis	100%	100	Jenis	100	Jenis	100%
X	XX	XX	XX		Pengawasan Barang Standar Perdagangan	Jumlah pengawasan barang standar perdagangan yang dilakukan	27	Orang	34	Orang	30	30	Orang	100%	30	Orang	30	Orang	30 %

Kode					Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar atau Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/hasil dari program)	Target Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun Berjalan (2023)		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pada Tahun (2023)			Target Realisasi Keuangan Tahun Berjalan		Realisasi Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Berjalan		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan
							Target Kinerja Keuangan (Rupiah) Tahun 2023		Realisasi Kinerja Keuangan (Rupiah) Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)					Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun berjalan (2023)		Capaian Capaian Realisasi (2023) dan Target (2023)
1					2	3	4		5		6		7	8=7:5		9		10=9:4
0	0	0	0	0	Pendukung dan Pengendalian Program Kerja Dalam Pemerintah	Jumlah Dokumen dan Pendukung dan Pengendalian Program Kerja Dalam Pemerintah	12	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	100%	1	Dokumen	1	100%
0	0	0			**Program Multisektor Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Program multisektor harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**	100	Persen	100,00	Persen	97	Persen	97	100%	100	Persen	100,00	100,00%
0	0	0	0	01	Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Wilayah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terjangkau oleh Masyarakat	97	Unit	1	Unit	1	Unit	1	100%	1	Unit	97	97%

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Keluaran (output) Kegiatan	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Pertama Perubahan		Realisasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun 2023		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Berkenaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Berkenaan		Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Pertama Perubahan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Berkenaan	
							Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan	Realisasi Kinerja	Kerangka Pendanaan	Target Kinerja	Kerangka Pendanaan
1					2	3	4		5		6		7	8		9		10	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode					Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Output Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan pada tahun berjalan (tahun n)		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan tahun sebelumnya (tahun 2022)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Perubahan Tahun Berkenaan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Rancangan Awal Tahun Berkenaan		
							Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kenaikan/ Penurunan (+/-)			Target Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Kerangka Pendanaan
1					2	3	4		5		6		7=(4-6)	8		9=(4+7-8)		10=(9-5)
					Belanja Bantuan Sosial	**Persentase Jumlah Penduduk Miskin**												
0	1	1	0		**Program Pengembangan Wilayah**	**Persentase pertumbuhan ekonomi sektor pertanian**	10	Persen	0.1278	Persen	1.58	Persen	1700.82	Persen	1700.82	10	Persen	80.0	Persen	0.0
0	1	1	0	01	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan pertambangan	10	Persen	0	Persen	10	Persen	10.00	Persen	0.00	10	Persen	10.0
0	1	1	0	01	0	Tersedianya Dokumen Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Laporan		Tersedia		1		1		1	1		1		0.0
0	1	1	0	01	1	Terfasilitasinya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Laporan		Tersedia		1		1		1	1		1		0.0
0	1	1	0	01	2	Terfasilitasinya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Laporan		Tersedia		1		1		1	1		1		0.0

Kode					Uraian Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Hasil Kegiatan (output)	Target Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) pada tahun awal perubahan (2023)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Hasil Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2024)			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Hasil Program dan Kegiatan Tahun Perubahan		Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan Hasil Program dan Kegiatan pada akhir tahun perubahan (2024)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Hasil Program dan Kegiatan pada akhir tahun (2026)
							Target Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Realisasi Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)		Kerangka Pendanaan (Rp)							

Kode					Urusan Wajib/ Urusan Pemerintahan Pilihan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Output Kegiatan	Target Kinerja sebelum Perubahan Program (Outcome) dan Kegiatan Tahun Berjalan		Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Setelah Perubahan			
											Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023		Capaian Realisasi (%)			Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (2023)		Kerangka Pendanaan (2023)
1					2	3	4		5		6		7		8=7:6	9		10=4+9		11=5+9
X	X.X	X.X	X.XX	X																
X	X.X	X.X																		
X	X.X	X.X	X.XX																	
X	X.X	X.X	X.XX	X																
X	X.X																			

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Pertama Perubahan		Realisasi Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada Tahun 2023		Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Kerangka Pendanaan pada Tahun Berjalan (Tahun 2024)				Realisasi Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) serta Kerangka Pendanaan pada Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan pada Tahun Rencana (Tahun 2025)
											Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		Kerangka Pendanaan (Rp)		Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)		
1					2	3	4		5		6		7		8 = 7 / 6		9		10 = 9 / 4 x 100
X	X	XX			Program Pemenuhan dan Pengembangan Hak Anak	Persentase Terpenuhinya kepuasan pemenuhan dan pengembangan hak anak	100	Persen	78	Persen	83,8	Persen	82,87	Persen	99%	80	Persen	87,1	Persen	87,1%
X.01	X.01	XX.01	XX.01		Pengelolaan data terpilah dan informasi perlindungan khusus anak	Jumlah Sistem pengelolaan perlindungan khusus anak terintegrasi	1	Sistem	1	Sistem	1	Sistem	1	Sistem	100%	1	Sistem	100	Sistem	100 %
X.02	X.02	XX.02	XX.02	X	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	1	Dokumen	100
X	X	X	X	X	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Lima Tahun	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaporan pembangunan daerah	10	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	8	dokumen	100%	8	dokumen	8	dokumen	100

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun (n+1) Awal			Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun (n+1) Perubahan		Realisasi Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun (n+1) Akhir
									Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Realisasi Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		(%) Capaian Realisasi (n-1) thd Target (n-1)				

Kode					Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Output Kegiatan	Target Kinerja sebelum Perubahan (Tahun Berjalan)	Realisasi Target Kinerja dan Realisasi Anggaran sd Triwulan IV	Target Kinerja dan Anggaran setelah Perubahan			Target Kinerja dan Anggaran yang Dipertanggungjawabkan	Realisasi Kinerja dan Anggaran yang Dapat Dicapai sampai dengan Triwulan IV	
									Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp)			
1					2	3	4	5	6	7	8=7/3	9	10=5/4*100	11=10/8*100
1	1	1	1.03		Pendidikan Pemerintah Pengelolaan Pendidikan Pemerintah Daerah yang meliputi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini	4 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen	11 Dokumen	275%	1 Dokumen	33 Dokumen	12%
1	1	1	1.03	01	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah lembaga pendidikan anak usia dini	4 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1	1 dokumen	3 dokumen	25%

Kode					Nomenklatur (Uraian) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) yang Diukur	Target Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2023	Target Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2024	Target Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2025	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Awal Tahun Rencana Penerapan Cukai	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pada Akhir Tahun Rencana Penerapan Cukai	
1					2	3	4	5	6=(5-4)/4 x 100%	7	8	9=(8-7)/7 x 100%
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode					Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) pada tahun berjalan (tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan pada Triwulan I (tahun 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Hasil Program dan Kegiatan Setiap Triwulan (Tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran Hasil Program dan Kegiatan pada Triwulan I (tahun 2023)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Hasil Program dan Kegiatan pada Triwulan I (tahun 2023)	
									Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan pada Triwulan I (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Hasil Program dan Kegiatan pada Triwulan I (tahun 2023)		Capaian Kinerja dan Anggaran (%)				
1					2	3	4	5	6		7		8=7/6 x 100%	9		10=7/9 x 100%	
					Urusan Pemerintahan Wajib												
					Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terkait dengan Pelayanan Dasar	Jumlah Kendaraan operasional Kecamatan											
					Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terkait dengan Pelayanan Dasar	Jumlah Kendaraan operasional Kecamatan											

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pada tahun 2023, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengelola pagu anggaran sebesar Rp.14.350.771.090,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.13.754.639.730,- (95%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 37 sub kegiatan pada 18 kegiatan yang tergabung dalam 10 program. Secara terperinci Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian
Rutin	8.212.925.143	7.737.884.757	94%
Pembangunan	6.137.845.947	6.016.754.973	98%
Total	14.350.771.090	13.754.639.730	95%

C. Capaian Kinerja Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ***Impact*** dari berbagai fasilitasi dan pelayanan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Tera/Tera Ulang total sebesar Rp.3.587.547.400,- atau 65,35% dari target yang ditetapkan Rp. 5.699.923.200 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Keterangan
	Retribusi Jasa Umum				
1	Retribusi Pasar	5.255.923.200	3.314.940.400	62,94%	Tidak Tercapai
2	Retribusi Tera	400.000.000	272.607.000	68,15%	Tidak Tercapai
	JUMLAH	5.655.923.200	3.587.547.400	65,35%	Tidak Tercapai

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dalam implementasi kinerja pelayanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian Misi Bupati yang keempat yaitu *"Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan"* dengan sasaran strategis 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2) meningkatnya kinerja perdagangan; dan 3) meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam NSPK dan IKK pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang diampu.

Berdasarkan sasaran tersebut ditandai dengan capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan relatif menggembirakan di tengah berbagai tantangan recovery pasca Pandemic Covid-19, sehingga mampu mendorong pencapaian sasaran strategis melalui pencapaian **outcome** pembangunan daerah yang diharapkan, khususnya pada Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.4

Penetapan Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Bintan tahun 2023-2026

No	Indikator	SPM	MV	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
A	Urusan Perdagangan											
1	Persentase nilai ekspor non migas (%)	–	MA	23	23	24	22	197.2	6.07	6.07	6.07	Persentase nilai ekspor non migas adalah perbandingan antara nilai ekspor non migas dengan total nilai ekspor dalam satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Nilai ekspor non migas mencakup semua jenis barang yang dijual ke luar negeri, tidak termasuk minyak dan gas. Persentase ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekspor non migas terhadap total ekspor suatu negara. Semakin tinggi persentase, semakin besar peran ekspor non migas dalam perekonomian.
2	Nilai usaha (Rekomendasi)	–	MA	2	4	4	4	10	4	4	4	Rekomendasi dinas perindustrian adalah rekomendasi untuk
3	Persentase barang kemasan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	–	MA	50	60	70	75	60.00	60.00	60.00	60.00	Persentase barang kemasan yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan
4	Persentase tenaga kerjasama pupuk (%)	–	MA	50	55	64	64	60.00	60.00	60.00	60.00	Persentase tenaga kerja sama pupuk
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan tertibu (%)	–	MA	60	65	70	75	66.67	76.47	65.00	65.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan

No	Indikator	Unit	Bob	Target Renstra (2025)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	Persentase stabilitas dan pemberian pelayanan harga barang kebutuhan pokok (%)	-	Bob	80	82	75	75	85,67	86,67	82	82	Dari 15 jenis yang dipantau Disperindag Kab Kolaka di pasar tradisional (Mingguan) antara Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, Kota Baubau, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat
B.	Urusan Perindustrian											
1	Persentase perkembangan PDB sektor industri pengolahan nonmigas (%)	-	Bob	3	3	3	3	5,00	5,40	5,40	5,45	Berdasarkan hasil analisis dari BPS pdt Kab / Kota, perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan (I-ORK) dengan kriteria sebagai sektor pengolahan industri pengolahan nonmigas Berdasarkan dari perhitungan Laporan, namun ini dari Perhitungan Laporan PDRB Kabupaten
2	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDB (%)	-	Bob	13	14	17	18	14,61	14,32	14,97	14,47	Rata-rata Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB (I-ORK) Kab/ Kota dari 2019-2021 adalah 14,46%
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Usaha Kecil	-	Bob	5.800	4.750	6.170	6.890	31.457	54.300	60.033	140.46	Ekspor tahun 2021 lebih rendah dari tahun

No	Indikator	SPM	SDG	Target Renstra (2025)				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2023	2024	2025	2026	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Menengah (Orang)	–	SDG 8	48.000	48.840	51.840	54.809	51.102	57.201	62.112	67.113	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan menengah, mencakup perusahaan dengan 20–99 pekerja
2	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Juta Rupiah)	–	SDG 8	113.571	116.343	119.149	126.533	137.913	167.662	182.304	182.304	Nilai investasi sektor industri non-migas yang tercatat melalui perizinan dan realisasi

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.2.1 Tantangan dan Peluang

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah :

a. Lemahnya peta industri potensial, masih rendahnya akurasi database sektoral perindustrian dan perdagangan;
b. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik;
c. Kurangnya tenaga teknis di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkompeten;
d. Belum terbangunnya sistem informasi perindustrian dan perdagangan;
e. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
f. Kurangnya sarana dan prasarana (pasar, metrologi, display IKM)

Adapun tantangan yang masih ditemui hingga saat ini adalah :

a. Tingginya jumlah IKM yang masih berproduksi secara konvensional yang mempengaruhi kualitas produknya;
b. Rendahnya kualitas manajerial IKM;
c. Masih banyak IKM yang belum bersertifikat / terstandardisasi (Merek, Halal, ISO, SNI, UN);
d. Kemajuan teknologi;
e. Luasnya wilayah pembinaan dan perbedaan kondisi geografis, serta
f. Lesunya ekonomi global.

Beberapa Peluang yang dapat diambil adalah:

a. Pemberian fasilitasi oleh pemerintah dan **stakeholders** dalam mensupport peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri pengolahan berupa pelatihan-pelatihan secara online serta fasilitasi sertifikasi HAKI sehingga meningkatkan daya saing;
b. Semakin mendominasinya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dan jaringan pemasaran digital bagi produk unggulan daerah
c. Penumbuhan sentra-sentra industri produk unggulan lokal yang beraneka ragam secara lebih masif;
d. Bertumbuhnya industri-industri dan pemasaran yang lebih kreatif untuk merebut pangsa pasar.

2.3.2 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang turut melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Perlunya **peningkatan kuantitas dan** kapasitas SDM perindustrian dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi lokal;

b. Pengembangan industri berbasis potensi lokal

Perencanaan Pembangunan dan pengembangan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan aturan pelaksanaannya secara komprehensif dan berkelanjutan. Sentra industri berbasis potensi lokal perlu dikembangkan dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian, baik dalam kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan **branding** daerah.

c. Revitalisasi pasar rakyat

Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dikembangkan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat, peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD;

d. Optimalisasi perlindungan konsumen melalui penguatan manajemen distribusi barang, Uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan barang penting lainnya;

e. Perlunya kerja sama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan **e-commerce**;

f. Perlunya **updating** data industri dan perdagangan yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memperhatikan saran hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, situasi dan tantangan perekonomian daerah, kerangka pendanaan pembangunan daerah dan sinergi pembangunan antara daerah dan nasional, maka perlu dirumuskan sasaran dan tema pembangunan daerah yang tepat.

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: B/050/345.1/409.3.2/2024 tanggal 01 Agustus 2024, tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025 adalah "**Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk**

Pemerintah Ekonomi Daerah" , lanjut dari 4 prioritas pembangunan yang terdistribusi kepada perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung pencapaian prioritas pembangunan ke-2 yaitu Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat, serta prioritas ke-4 yaitu Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang dan Pasar melalui 3 (tiga) program prioritas sebagai berikut :

a. Program Pembangunan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
b. Program Pengembangan Ekspor
c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan tahun 2025 dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025. Review dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Kerangka Acuan RKPD Tahun 2025

Kabupaten Biak

No	Kerangka Acuan RKPD					Hasil Analisis Rekomendasi					Rekomendasi Perubahan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rekomendasi Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											

No	Rincian Data SAAT INI					Usulan Perubahan					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rekomendasi Pagu (Rp.)	Keterangan
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Kantor Lurah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kegiatan	Rp. 150.000.000	Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan	Kantor Lurah	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kegiatan	Rp. 150.000.000	Pengembangan kapasitas aparatur kelurahan, termasuk pelatihan, bimtek, dan peningkatan kompetensi
1.1	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kantor Lurah	Jumlah kelompok binaan aktif	12 kelompok	Rp. 50.000.000	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kantor Lurah	Jumlah kelompok binaan aktif	12 kelompok	Rp. 50.000.000	Pembinaan rutin kepada kelompok masyarakat, termasuk pertemuan, pendampingan, dan fasilitasi kegiatan
2	**Lanjutan Kegiatan Tahun Sebelumnya**	**Kantor Lurah**	**Jumlah kegiatan lanjutan yang berjalan sesuai rencana**	**100 %**	**Rp. 200.000.000**	**Lanjutan Kegiatan Tahun Sebelumnya**	**Kantor Lurah**	**Jumlah kegiatan lanjutan yang berjalan sesuai rencana**	**100 %**	**Rp. 200.000.000**	
2.1	Pengadaan Alat Kantor Kelurahan	Kantor Lurah	Jumlah alat kantor yang diadakan	10 unit	Rp. 25.000.000	Pengadaan Alat Kantor Kelurahan	Kantor Lurah	Jumlah alat kantor yang diadakan	10 unit	Rp. 25.000.000	Mendukung pelayanan kantor kelurahan
3.0	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	Kantor Lurah	Jumlah pembangunan infrastruktur yang selesai	3 lokasi	Rp. 300.000.000	Pembangunan Infrastruktur Lingkungan	Kantor Lurah	Jumlah pembangunan infrastruktur yang selesai	3 lokasi	Rp. 300.000.000	Meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Perubahan					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rekomendasi Pagu (Rp.)	Alasan Perubahan
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k

No	Kurang dari RP.					Lebih dari RP.					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Output	Target Kuantitas	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Output	Target Kuantitas	Rekomendasi Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Pengembangan Budidaya dan Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Bangun Pembangunan Pembangunan Bandar, yang Dimanfaatkan	1	Paket	Pengembangan Budidaya dan Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Bangun Pembangunan Pembangunan Bandar, yang Dimanfaatkan	1	Paket	Evaluasi pembangunan pembangunan
1.2	Pengembangan Budidaya Rumah Tangga	Kota Bitung	Jumlah Rumah Budidaya Rumah Tangga yang dimanfaatkan	1	Paket	Pengembangan Budidaya Rumah Tangga	Kota Bitung	Jumlah Rumah Budidaya Rumah Tangga yang Dimanfaatkan	1	Paket	Budidaya Rumah Tangga
1.3	Pengembangan Budidaya Logistik Bandar	Kota Bitung	Jumlah Pusat Budidaya Logistik Pembangunan yang dimanfaatkan	1	Paket	Pengembangan Budidaya Logistik Bandar	Kota Bitung	Jumlah Pusat Budidaya Logistik Pembangunan yang dimanfaatkan	1	Paket	Budidaya dan gudang
1.4	Pengembangan Budidaya Pembangunan	Kota Bitung	Jumlah Bangun Budidaya Pembangunan Pembangunan yang Dimanfaatkan	1	Paket	Pengembangan Budidaya Pembangunan	Kota Bitung	Jumlah Bangun Budidaya Pembangunan Pembangunan yang Dimanfaatkan	1	Paket	Pengembangan budidaya pembangunan
1.5	Pengembangan Budidaya Rumah Tangga dan Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Lapangan Pembangunan Rumah Tangga dan Pembangunan Bandar yang Dimanfaatkan	10	Lapangan	Pengembangan Budidaya Rumah Tangga dan Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Lapangan Pembangunan Rumah Tangga dan Pembangunan Bandar yang Dimanfaatkan	10	Lapangan	Pengembangan budidaya rumah tangga dan pembangunan bandar
1.6	Pengembangan Budidaya Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Pembangunan Pembangunan Bandar yang Dimanfaatkan	100	Pembangunan	Pengembangan Budidaya Pembangunan Bandar	Kota Bitung	Jumlah Pembangunan Pembangunan Bandar yang Dimanfaatkan	100	Pembangunan	Budidaya pembangunan bandar

No	Kurangan (Rp)					Kenaikan (+) / Penurunan (-)					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rancangan Kerja (Rp)	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Lainnya	Kab. Blora	Persentase Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Lainnya	100 Persen	100.000.000	Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Lainnya	Kab. Blora	Persentase Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi Lainnya	100 Persen	100.000.000	
2.1	Pengadaan Alkes	Kab. Blora	Jumlah Pengadaan Alkes	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Alkes	Kab. Blora	Jumlah Pengadaan Alkes	1 Unit		
2.2	Pengadaan Perlengkapan Alkes Lainnya	Kab. Blora	Jumlah Pengadaan Alkes	1 Unit	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan Alkes Lainnya	Kab. Blora	Jumlah Pengadaan Alkes	1 Unit	50.000.000	Belanja alat kesehatan
3	Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi	Kab. Blora	Persentase Jasa Konsultasi	100 Persen	2.547.227.000	Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi	Kab. Blora	Persentase Jasa Konsultasi	100 Persen	2.547.227.000	
3.1	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Teknis	Kab. Blora	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Teknis	10 Laporan	200.000.000	Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Teknis	Kab. Blora	Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Konsultasi Perencana Teknis	10 Laporan	197.227.000	Berdasarkan hasil pengadaan

No	Kurang (Rp)					Kelebihan (Rp)					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Output	Target Kuantitas	Nilai Anggaran (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Output	Target Kuantitas	Realisasi Anggaran (Rp)	Keterangan
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Keterangan Data RKPD					Usulan Perubahan					Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rekomendasi Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											

No	Kurikulum Saat Ini					Kurikulum Merdeka					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Biaya (estimasi dalam Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Kurang (Sebelum)					Menjadi (Setelah Perubahan)					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Anggaran (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

No	Kurikulum Saat Ini					Kurikulum Merdeka					Aktivitas Belajar
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Capaian	Target Peserta	Biaya (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Capaian	Target Peserta	Biaya (Rp)	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2											
3											
4											

No	Kondisi yang Diatur (KAK)					Kondisi yang Dikehendaki					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kuantitas	Biaya (estimasi) (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kuantitas	Biaya (estimasi) (Rp.)	Keterangan
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1											
2											
3											

No	Kondisi Saat Ini					Kondisi yang Diharapkan					Solusi Perbaikan
	Proses/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Biaya (Jutaan Rp)	Proses/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Waktu (Bulan)	Solusi Perbaikan
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim	Ruang Rapat	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman	1 Laporan		Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim	Ruang Rapat	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman	1 Laporan		Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim
2	Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim	Ruang Rapat	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman	1 Laporan	20.000.000	Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim	Ruang Rapat	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman	1 Laporan	20.000.000	Pengumpulan Data Awal Rapat Koordinasi Awal Penyusunan Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim
3	**Pengumpulan Proposal dan Rapat Koordinasi Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan**	**Ruang Rapat**	**Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman**	**1 Laporan**	**40.000.000**	**Pengumpulan Proposal dan Rapat Koordinasi Proposal Kajian Pembuatan Surat Undangan Pembagian Tugas Tim**	**Ruang Rapat**	**Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Rapat Notulen Rapat Daftar Hadir Peserta Surat Undangan Bukti Pengiriman**	**1 Laporan**	**40.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Perubahan					Keterangan Perubahan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Program Pengembangan Wisata	Kota Bitung	Meningkatnya kunjungan wisata	10	Persen	500.000.000	Program Pengembangan Wisata	Kota Bitung	Meningkatnya kunjungan wisata	12	Persen	600.000.000	
2	Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Lembeh dan Pulau Bitung	Kota Bitung	Terbangunnya jembatan penghubung	1	Unit	1.500.000.000	Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Lembeh dan Pulau Bitung	Kota Bitung	Terbangunnya jembatan penghubung	1	Unit	1.500.000.000	
3	Pembangunan Pelabuhan Internasional	Kota Bitung	Meningkatnya arus barang	5	Persen	2.000.000.000	Pembangunan Pelabuhan Internasional	Kota Bitung	Meningkatnya arus barang	6	Persen	2.200.000.000	
4	Pembangunan Kawasan Industri	Kota Bitung	Terbangunnya kawasan industri	1	Kawasan	3.000.000.000	Pembangunan Kawasan Industri	Kota Bitung	Terbangunnya kawasan industri	1	Kawasan	3.000.000.000	

No	Kondisi Saat Ini (Awal RPJPD)					Kondisi yang Diharapkan					
	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal	Target Akhir	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Akhir	Target Akhir	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1											
1.1											
1.2											
2											
2.1											
2.2											

No	Kondisi Saat Ini (As Is)					Kondisi yang Diharapkan					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rekomendasi Pagu (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

No.	Kurzungen (neu Stand)					Kurzungen (a. Regierungsentwurf)					Anmerkungen Beschluss
	Programmbezeichnung	Ressort	Funktionale Bezeichnung	Ausgaben Regierungsentwurf	Ausgaben Veränderung (Mio.)	Programmbezeichnung	Ressort	Funktionale Bezeichnung	Ausgaben Regierungsentwurf	Ausgaben Veränderung (Mio.)	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2											
3											
4											
5											

No	Kurikulum Saat Ini					Kurikulum Merdeka					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Biaya (Jutaan Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Waktu/Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler	Kota Mitra	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler Lokal yang Terintegrasi dengan Kurikulum	12 Kegiatan	150.000.000	Pengembangan Kurikulum Berbasis Kearifan Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler	Kota Mitra	Jumlah Kegiatan Ekstrakurikuler Lokal yang Terintegrasi dengan Kurikulum dan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	12 Kegiatan	150.000.000	Program berjalan sesuai rencana
2	Pelatihan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Berdiferensiasi	Kota Mitra	Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan dan Implementasi dalam Pembelajaran	40 Guru	120.000.000	Pelatihan Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka dan Pembelajaran Berdiferensiasi	Kota Mitra	Jumlah Guru yang Mengikuti Pelatihan dan Implementasi dalam Pembelajaran	40 Guru	120.000.000	Pelatihan dilaksanakan oleh Widyaiswara dan Fasilitator Lokal
3	Program Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa	Kota Mitra	Persentase Peningkatan Literasi dan Numerasi Siswa	100 Persen	180.000.000	Program Penguatan Literasi dan Numerasi Siswa	Kota Mitra	Persentase Peningkatan Literasi dan Numerasi Siswa	100 Persen	180.000.000	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Normalisasi Saluran Irigasi (JLU), dan Jembatan Sungai (JLU) dan Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Desa Mekar	Jumlah kilometer jalan yang dibangun	12 Kilometer	120.000.000	Pembangunan Jalan Lingkar Utara (JLU) dan Normalisasi Saluran Irigasi (JLU), dan Jembatan Sungai (JLU) dan Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan	Desa Mekar	Jumlah kilometer jalan yang dibangun	12 Kilometer	120.000.000	
1.1	Pembebasan dan Pembangunan Perkerasan Jembatan Lingkar Utara (JLU) Kecamatan	Desa Mekar	Jumlah kilometer jalan Jumlah jembatan Jumlah gedung serbaguna Jumlah irigasi yang dinormalisasi	7 Kilometer	70.000.000	Pembebasan dan Pembangunan Perkerasan Jembatan Lingkar Utara (JLU) Kecamatan	Desa Mekar	Jumlah kilometer jalan Jumlah jembatan Jumlah gedung serbaguna Jumlah irigasi yang dinormalisasi	7 Kilometer	70.000.000	

No.	Kurang (Rp)					Kurang (Rp)					Keterangan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kuantitas	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kuantitas	Rekomendasi Pagu (Rp.)	Keterangan Revisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											

No	Perubahan (Isian BARU)					Perubahan (Isian Sebelumnya)					Alasan Perubahan
	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja (Rp.)	
	a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.
1											
2											
3											
dst											

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan rancana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar membuka akses bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta memberikan usulan pembangunan sekaul urusan perindustrian dan urusan perdagangan yang selaras dengan rumusan Rancangan Renja melalui Musrenbang Kecamatan dan Pokok Pikir DPRD. Pada Rancana Kerja Tahun 2025, terdapat beberapa usulan kegiatan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik melalui Musrenbang Kecamatan maupun Pokok Pikir DPRD sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Blitar

Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran Rp	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	POKOK PIKIRAN DPRD					
I	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**			
1.	*Keg Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik			
a.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Talun, Kab. Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 paket	100.000.000	Penyusunan Masterplan Pasar Talun
b	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Garum, Kab. Blitar	Jumlah sarana distribusi perdagangan	1 paket	100.000.000	Penyusunan Masterplan Pasar Garum
II	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**		**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**			

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran Rp	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***		***Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri***			
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Desa Grogoltoso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20 orang	100.000.000	Perlunya peningkatan SDM berupa pelatihan pembuatan batako bagi masyarakat
b.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Desa Gaprang, Kec. Kanigoro Kab. Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20 orang	100.000.000	Perlunya peningkatan SDM berupa pelatihan pembuatan batako bagi masyarakat
	HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD 2025					
I	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					
f.	***Kegi Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***					
a.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jl. Kepundung No. 25 Lingkungan Pandean, Kab. Blitar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	20 unit	12.000.000	Fasilitasi Mesin Dagang
b.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dusun Tambalang, Dusun Galur, Kab. Blitar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang dilaksanakan	30 unit	18.000.000	Fasilitasi Mesin Dagang
c.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan	Jln. Supriyadi No. 06 RT 04/RW 03, Des	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	40 unit	24.000.000	Fasilitasi Mesin Dagang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Anggaran Rp	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Industri dan Peran Serta Masyarakat	Resapombo, Desa Resapombo, Kab. Blitar	Industri dan Peran Serta Masyarakat yang Diaksanakan			
d.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Desa Slorok, Kab. Blitar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang diaksanakan	2 sertifikat	18,764,800	Fasilitasi Sertifikasi Halal
e.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kel. Tegogan, Kab. Blitar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang diaksanakan	5 unit	3,000,000	Fasilitasi Merek Dagang
f.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Lingk. Kendalsoyong RT.02/RW. 01, Kel. Tegogan, Kab. Blitar	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat yang diaksanakan	2 sertifikat	18,764,800	Fasilitasi Sertifikasi Halal

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada Misi ke-3 yaitu *Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas* serta Misi ke-4 yaitu *Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan*[1] maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengacu pada Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar yaitu *"Meningkatnya Produktifitas Sektor Unggulan Daerah"*.

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan Tahun 2026

a. Tri Karsa Transformasi Perdagangan dan Desa Mendala Kebijakan Perdagangan 2026 – 2029.

a.1 Transformasi Struktural

PD1. Hilirisasi dan Transformasi Struktur Ekspor Indonesia berbasis Manufaktur Berteknologi Tinggi dan Menengah.

PD2. Transformasi Struktur Konsumsi Berbasis Penguatan Potensi Pasar Dalam Negeri

a.2 Integrasi Kewilayahan

PD3. Penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dengan perdagangan antar wilayah

PD4. Penguatan supply chain dan logistik nasional

PD5. Transformasi Sistem Perlindungan Konsumen dan Pemberdayaan Konsumen.

a.3 Penerapan Tata Kelola Perdagangan yang Baik dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PD6. Integrasi Sistem Pelayanan Perdagangan Berbasis Elektronik

PD7. Digitalisasi dan Otomatisasi Pelayanan Sumber Daya Manusia di Kemendag

PD9. Pengawasan Pengawasan yang Optimal dan Efektif

PD8. Transformasi Sumber Daya Manusia Perdagangan yang Kreatif dan Kompetitif

PD10. Transformasi Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan yang Agile dan Berakhlak

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian Tahun 2026

Arah kebijakan prioritas pembangunan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan kesimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

3.1.3. Arahan Kebijakan Pengembangan Industri dan Perdagangan Dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

a. Arah Kebijakan Pengembangan Industri :

- Tujuan :
  Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Sasaran :
  Meningkatnya nilai tambah ekonomi
- Prioritas 7.2 :
  Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa
- Program Prioritas : Peningkatan Daya Saing Produk

b. Arah Kebijakan Pengembangan Perdagangan :

- Tujuan :
  Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
- Sasaran :
  Meningkatnya nilai tambah ekonomi
- Prioritas 7.2 :
  Pembangunan ekonomi kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa.
- Program Prioritas : Stabilisasi Harga dan Promosi Perdagangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar didasarkan atas rumusan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra PD. Dengan mengacu pada Misi ke-3 dan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	Target 2025
1	2	3	4	5	
	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah		a. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,33%
			b. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	3,43%
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	Nilai	80 / A
		2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	8.122,75 Miliar Rupiah
		3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	%	2,69%
			b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	%	16,62%

Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 **adalah** "Penguatan SDM Unggul dan Ekosistem Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah" dengan prioritas sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah "Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Lokal" serta "**Meningkatkan** Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang".

3.3 Program dan Kegiatan

Berpedoman pada prioritas pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah 2021-2026, penyelarasan Rancangan Renja dengan Rancana Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025, serta mempertimbangkan kinerja program kegiatan pada tahun sebelumnya dan isu-isu saat ini, maka pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merencanakan untuk melaksanakan

10 program dengan alokasi pagu indikatif Rp. 18.907.703.704,- guna mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sepuluh Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (**prioritas**)
4. Program Pengembangan Ekspor (**prioritas**)
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (**prioritas**)
7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (**prioritas**)
8. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
9. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Proyeksi Maju Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.1
Rancangan Rincian Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan dan Perdagangan Kabupaten Biltar
Tahun 2025 dan Proyeksinya Hingga Tahun 2026

Nama SKPD : Dinas Perhubungan dan Perdagangan

Kode					Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kelompok Belanja	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Tahun		Kebutuhan Dana Tahun 2026 (rupiah)	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026		
													Target Capaian Tahun	Kebutuhan Dana Tahun 2026 (rupiah)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
X					JUMLAH PENDAPATAN DAERAH					12.317.772.7					12.31
X	X				JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH					11.211.11					11.211
X	X	X			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah	Kota Biltar	12	12	11.211.11	Pajak		12	Persen	11.211.11
						Rasio kemandirian keuangan daerah		100	100				100	Persen	
X	X	X	X	XX	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan dan Retribusi Pasar Rakyat Kota	Jumlah Pendapatan Retribusi Penyelenggaraan Pasar Rakyat yang dapat dikelola dan dikembangkan	Kota Biltar	100	Rupiah	12.211.111	Jasa		100	Rupiah	12.211.111
X	X	X	XX	X	Pengelolaan Retribusi Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Jumlah Pendapatan Retribusi Pasar Rakyat	Kota Biltar	1	Kabupaten	11.211.111	Jasa	Pengelolaan Retribusi Pasar Rakyat Kota Biltar	1	Kabupaten	11.211.111

Kode					Uraian/Rincian Urusan Pemerintahan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Output	Kebutuhan Pendanaan (Rp)	Sumber Dana	Perangkat Daerha Pelaksana	Prakiraan Maju Kebutuhan Pendanaan (Rp)	
											Target Capaian Output	Kebutuhan Pendanaan (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Kode					Uraian/Nomor Rekening/Nama Barang dan Jasa/Keterangan	Satuan Ukuran/Nama Barang/Nama Jasa/Keterangan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Nomor Kode	Catatan Akuntan	Realisasi Anggaran Periode Ini	
												Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
x.x	x.x	x	x.x		**[illegible]**	**[illegible]**	x.x	**[illegible]**	**[illegible]**	[illegible]		x.x	**[illegible]**
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]
x.x	x.x	x	x.x	x	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	x.x	[illegible]

Kode					Uraian/Nama Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Program/ Kegiatan	Sumber Dana	Perangkat Daerah Pelaksana	Kelompok Sasaran Program/ Kegiatan	Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Program/ Kegiatan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x.xx	x.xx	x	x.xx	x.xx	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Kota/ Kab	100	Angka/Nilai	Rp 000.000.000	Kota	Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana/ Bidang/ Seksi/ Subbidang/ Subseksi/ Kelompok Jabatan Fungsional	100	Angka/Nilai	Rp 000.000.000
x.xx	x.xx	x	x.xx	x.xx	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Kota/ Kab	100	Orang/Unit	Rp 000.000.000	Kota	Perangkat daerah/Unit kerja/ Kelompok	100	Orang/Unit	Rp 000.000.000
x	**x.xx**	**x**	**x.xx**		**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek**	**Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek yang akan dicapai**	Kota/ Kab	100	Rumah	Rp 000.000.000	Kota		100	Rumah	Rp 000.000.000
x.xx	x.xx	x	x.xx	x.xx	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Kota/ Kab	10	Unit		Kota		10	Unit	Rp 000.000.000
x.xx	x.xx	x	x.xx	x.xx	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Kota/ Kab	10	Unit	Rp 000.000.000	Kota	Bidang/Seksi/ Unit Kerja	10	Unit	Rp 000.000.000
x	**x.xx**	**x**	**x.xx**		**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek**	**Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek yang akan dicapai**	Kota/ Kab	100	Rumah	Rp 000.000.000	Kota		100	Rumah	Rp 000.000.000
x.xx	x.xx	x	x.xx	x.xx	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur/Aspek/Fungsi Utama/Pokok/Sub Pokok/Jenis/Obyek/Rincian Objek	Kota/ Kab	100	Angka/Nilai	Rp 000.000.000	Kota	Perangkat Daerah/ Unit Kerja/ Unit Pelaksana	100	Angka/Nilai	Rp 000.000.000

Kode					Uraian/Nomor Urut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Unsur	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan Kinerja	Standar Pelayanan	Perubahan Atas Rencana Kinerja Tahun 2026	
												Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Kegiatan/ Indikator
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	XX	X	Program [illegible]	[illegible]	Kab/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	X	X	XX		**[illegible]**	**[illegible]**	Kab/Kota	**[illegible]**	**[illegible]**	[illegible]		**[illegible]**	**[illegible]**
X	X	X	XX	X	[illegible]	[illegible]	Kab/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	X	X	XX	X	[illegible]	[illegible]	Kab/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
X	X	X	XX	X	[illegible]	[illegible]	Kab/Kota	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode					Uraian/Nomor Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Akun/Kelompok/Jenis/Obyek/Rincian Objek/Sub Rincian Objek	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja Belanja	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Nomor Pasal	Sistem Pembayaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	
												Target Kinerja Belanja	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode						Uraian/Nomor Rekening/Nama Barang dan Jasa/Keterangan	Informasi Khusus Program Pengembangan Otonomi	Lokasi	Target Capaian Output	Kelompok Sasaran Kegiatan/ Output	Satuan Ukur	Sistem Akuntansi	Rincian Anggaran Belanja Menurut Fokus Belanja	
													Target Capaian Output	Kelompok Sasaran Kegiatan/ Output
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
x.x	xx	xx	xx	xxx	xx	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan	Analisis ekonomi masyarakat pengembangan	Kab. Alfa	10	Unit	x.x.xx.xxx.x.xxx	Unit	Sistem OMSPAN Fokus Belanja Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fokus Belanja Alat Fokus Belanja Unit Ekonomi Pengembangan Pengembangan Ekonomi Alat Fokus Belanja Pengembangan Ekonomi Fokus Belanja Pengembangan Fokus Belanja	10	Unit	x.xxx.xxx.xxx
x.x	xx	xx	xxx	xx		Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan	Analisis Kebutuhan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan	Kab. Alfa	10	Unit	xxx.xxx.xxx	Unit	Pengembangan Ekonomi masyarakat pengembangan Analisis pelatih Pengembangan Ekonomi Masyarakat pengembangan	10	Unit	xxx.xxx.xxx
x.x	xx	xx	xx			**Pembinaan Teknologi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan**	**Analisis kebutuhan pengembangan ekonomi masyarakat**	Kab. Alfa	**10**	**Kelg**	**xx.xxx.xxx**	Unit		**10**	**Kelg**	**x.xx.xxx.xxx**
x.x	xx	xx	xxx	xx		Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan	Analisis Kebutuhan Pelatih Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan	Kab. Alfa	0	Kelompok	xx.xxx.xxx	Unit	Pengembangan ekonomi masyarakat pengembangan Pengembangan ekonomi masyarakat pengembangan Unit Pengembangan ekonomi masyarakat	0	Kelompok	x.xxx.xxx

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Kode					Uraian Urusan Pemerintahan, Bidang, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Program	Realisasi Kinerja	Kendala Pelaksanaan	Realisasi Anggaran Tahun 2020	
												Target Kinerja Program	Realisasi Anggaran Untuk Mencapai Target
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10

Kode					Uraian/Nama Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Program/ Kegiatan	Satuan Ukuran	Dimensi Ruang	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
												Target Kinerja Program	Kelompok Sasaran Program/ Kegiatan
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
									[illegible]		[illegible]
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]					[illegible]					[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode					Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Lokasi	Target Capaian Output	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Ketarangan	Perubahan Sebelum Penetapan	
											Target Capaian Output	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
x.xx	x.xx.x	x.xx.x.x	x.xx.x.x.xx	x.xx.x.x.xx.xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxx
x.xx	x.xx.x	x.xx.x.x	x.xx.x.x.xx	x.xx.x.x.xx.xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxx
x.xx	x.xx.x	x.xx.x.x			xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxx
x.xx	x.xx.x	x.xx.x.x	x.xx.x.x.xx	x.xx.x.x.xx.xxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxxxxxxxxx	xxx	xxx	xxx

[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Lokasi	Target Kinerja Belanja	Kelompok Sasaran Kegiatan	Sumber Dana	Perangkat Daerah Pelaksana	Target Kinerja Belanja	Kelompok Sasaran Kegiatan
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	XX	X	Pendidikan dan Bidang pendidikan	Indeks pendidikan [redacted]	Kab. Mesa	X	Masyarakat	[redacted]	[redacted]	X	Masyarakat
X	X	X				Program [redacted]	Persentase [redacted]	Kab. Mesa	[redacted]	Persen	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Kode					Uraian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Output	Kelompok Sasaran Kegiatan	Sumber Dana	Perangkat Daerah Pelaksana	Target Capaian Output	Kelompok Sasaran Kegiatan
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	**X**	**X**	**XX**		**Program ...**	...	**...**	**...**	...	...	**...**	**...**
X	X	X	XX	X	...	...	...	...	...	...	...	...

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah *"Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah"* dengan tiga sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Anggaran / Pagu Indikatif Rp.
	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	*Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*	5,23%	17.615.174.104
		Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	5,48%	1.227.029.600
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	80 / A	8.587.174.104
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	8.123,79 Miliar Rupiah	9.061.500.000
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	2,59%	1.227.029.600
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	19,92%	

Untuk mencapai sasaran tersebut, dengan keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang tersedia, maka ditetapkanlah serangkaian program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025, yang terbagi dalam dua urusan pemerintahan. Kedua urusan tersebut adalah Urusan Perdagangan, terdiri dari 7 program termasuk didalamnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah), 16 kegiatan, 35 sub kegiatan dan Urusan Perindustrian terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.1 tentang Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam 7 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 14.565.400,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 7 dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 6.509.400,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 7 laporan
- Hasil (Outcomes) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 4.484.503.104,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, 40 Orang/Bulan
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 36.220.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 360 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100 Persen

- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU) Rp. 7.816.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 17 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 1,2 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 6%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU) Rp. 47.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; 15 Orang
- Hasil (Outcomes) : Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU) Rp. 2.204.460,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ; 6 Paket
- Hasil (Outcomes) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU) Rp. 24.417.447,-

- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 4 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel : 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 2.265.792,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ; 6 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel : 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 2.031.300,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ; 12 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel : 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 419.804.250,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ; 3 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel : 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 304.185.801,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 60 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel : 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%

- Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

d.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 80.450.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 400 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

e. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja :

e.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 0,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan ; 5 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 280.506.091,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

1.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.660.563.800,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen

- Manfaat (**Benefit**) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dan sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan (**Input**) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 43.500.000,-
- Keluaran (**Output**) : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; 1 Unit
- Hasil (**Outcomes**) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100 Persen
- Manfaat (**Benefit**) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dan sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan (**Input**) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 72.525.100,-
- Keluaran (**Output**) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 35 Unit
- Hasil (**Outcomes**) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (**Benefit**) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dan sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan (**Input**) : Tersedianya dana (DAU), Rp. 16.146.788,-
- Keluaran (**Output**) : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; 35 unit
- Hasil (**Outcomes**) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (**Benefit**) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dan sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU);

Rp. 50.808.731,-

- Keluaran (Output) : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; 1 Unit
- Hasil (Outcomes) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100 Persen
- Manfaat (Benefit) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 1,2%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

c. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan berikut :

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DNU) Rp. 4.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan; 3 Rekomendasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DNU) Rp. 3.200.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); 4 Laporan
- Hasil (Outcomes) : Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota; 75%
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dijabarkan dalam 2 kegiatan :

a. Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 8.412.550.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 11 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 60%

a.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 100.000.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 11 unit
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 60%

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator kinerja :

b.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp. 62.450.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina; 85 Orang
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dijabarkan dalam 3 kegiatan :

a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp 21.060.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 6 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Bar'ang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok terkininya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 93%

b.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp 28.600.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; 5 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 85%

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

c.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi:

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp 17.300.000,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ; 4 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan; 4 kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 83%

f. Program Pengembangan Ekspor, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Tersebar pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pameran Dagang Nasional

- Masukan (*Input*) : Tersedianya dana (DAU); Rp 54.377.500,-
- Keluaran (*Output*) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; 20 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.2 Pameran Dagang Lokal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 59.940.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal; 30 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen

- Manfaat (Benefit) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp.37.574.100,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan; 10 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

a.4 Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp.40.623.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi; 25 Produk
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 30 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 9,87%

g. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kinerja :

a.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp.127.945.788,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diteta Ulang; 8.500 Unit
- Hasil (Outcomes) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 92 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6,25%

a.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp.58.054.212,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; 550 Orang
- Hasil (Outcomes) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 92 Persen
- Manfaat (Benefit) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 6,25%

h. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp 30.325.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Ritel, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi; 20 UMKM
- Hasil (Outcomes) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 30 orang
- Manfaat (Benefit) : Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 88%

i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp 12.500.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri; 1 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%.

a.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DBHCHT). Rp 200.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 2 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%.

a.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); DBH CHT Rp. 1.014.526.600,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 3 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 10 fasilitasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%.

j. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terdiri atas 2 kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja:

a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp 7.500.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 4 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 7 Rekomendasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%.

a.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU). Rp. 15.000.000,-
- Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 4 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 7 Rekomendasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%.

k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri atas 1 kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.3 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU).

Rp. 40.000.000,-

- Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), 1 Dokumen
- Hasil (Outcomes) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri, 713 Fasilitasi
- Manfaat (Benefit) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri, 2,65%

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2021-2026.

Selain target RPJMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan berupa ketersediaan anggaran kegiatan sebagaimana masukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk dibiayai dari APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2025.

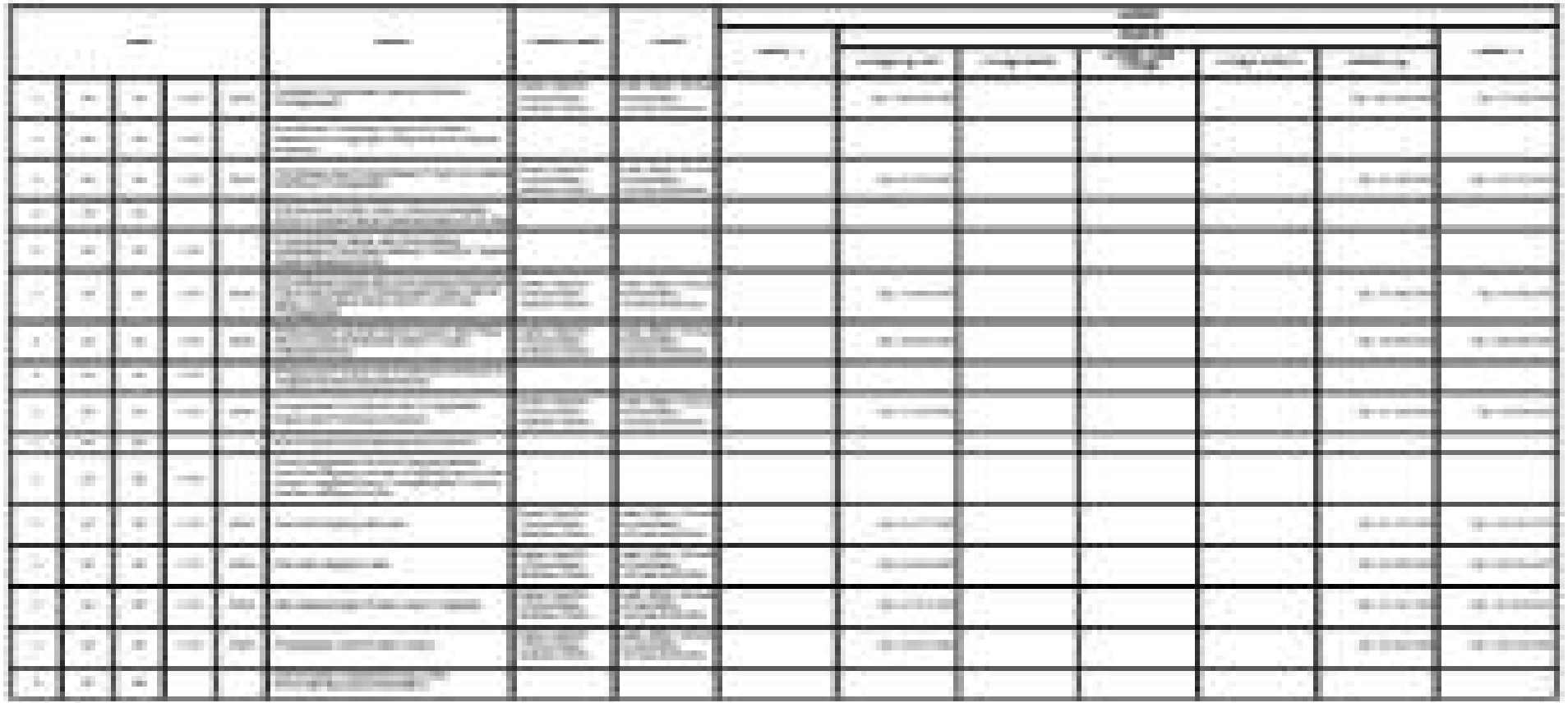
Semoga Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

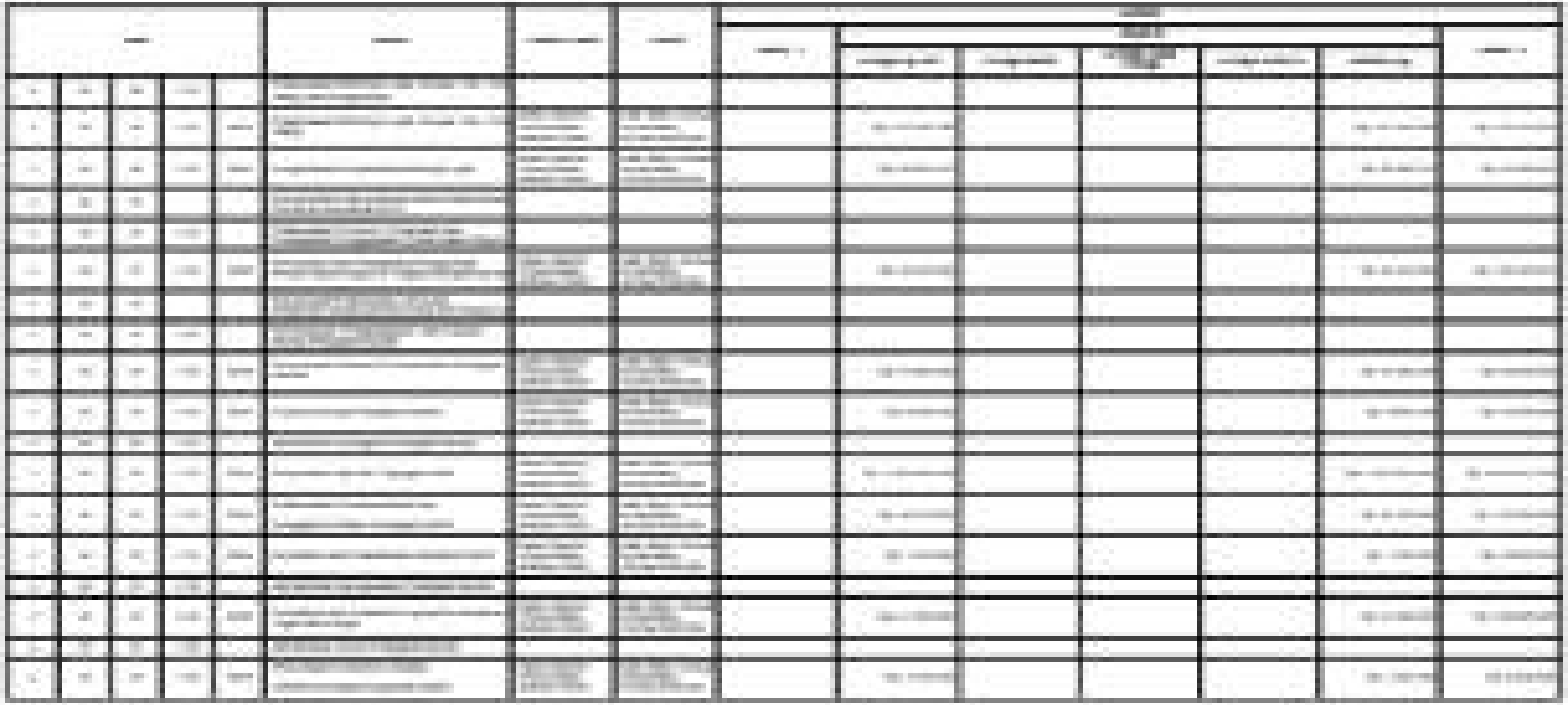
Blitar, 12 Agustus 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

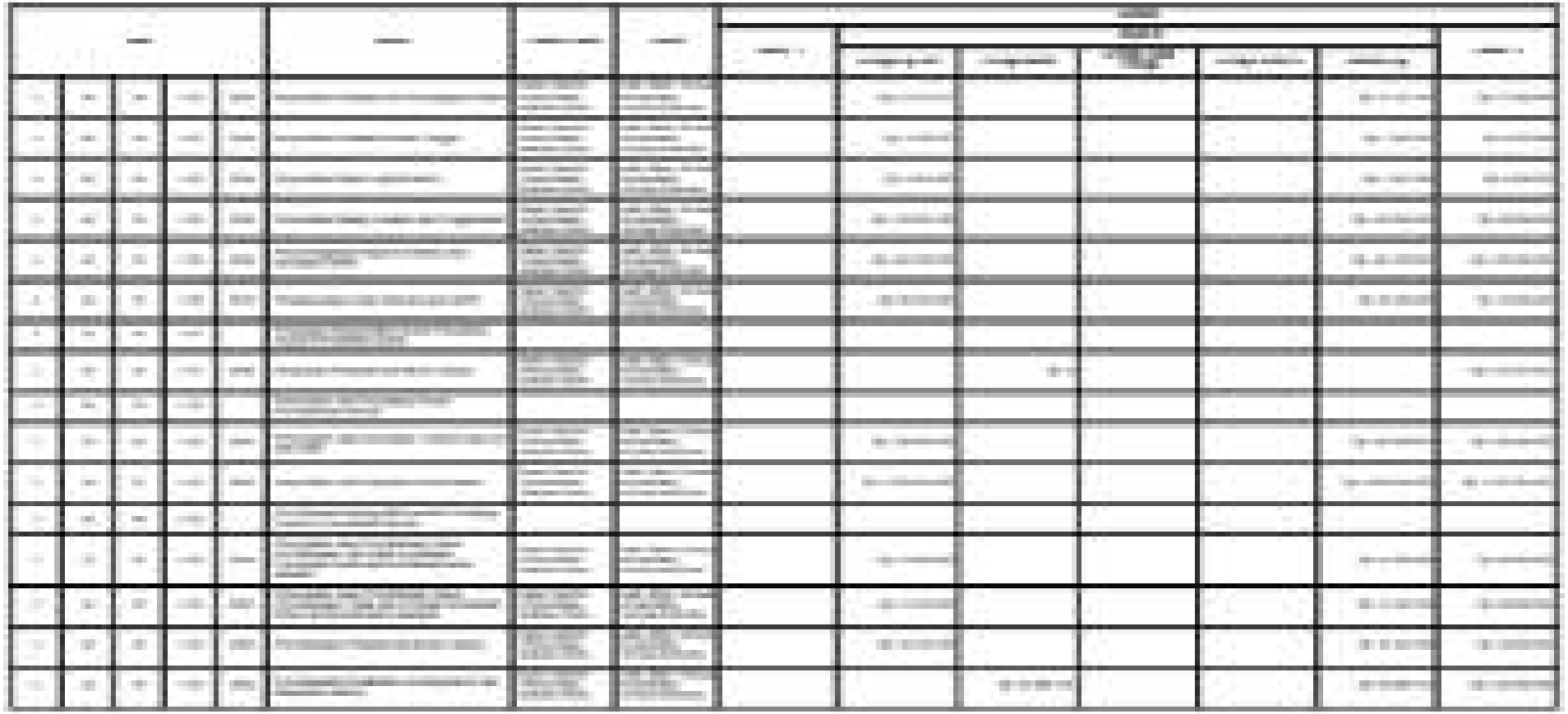
DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

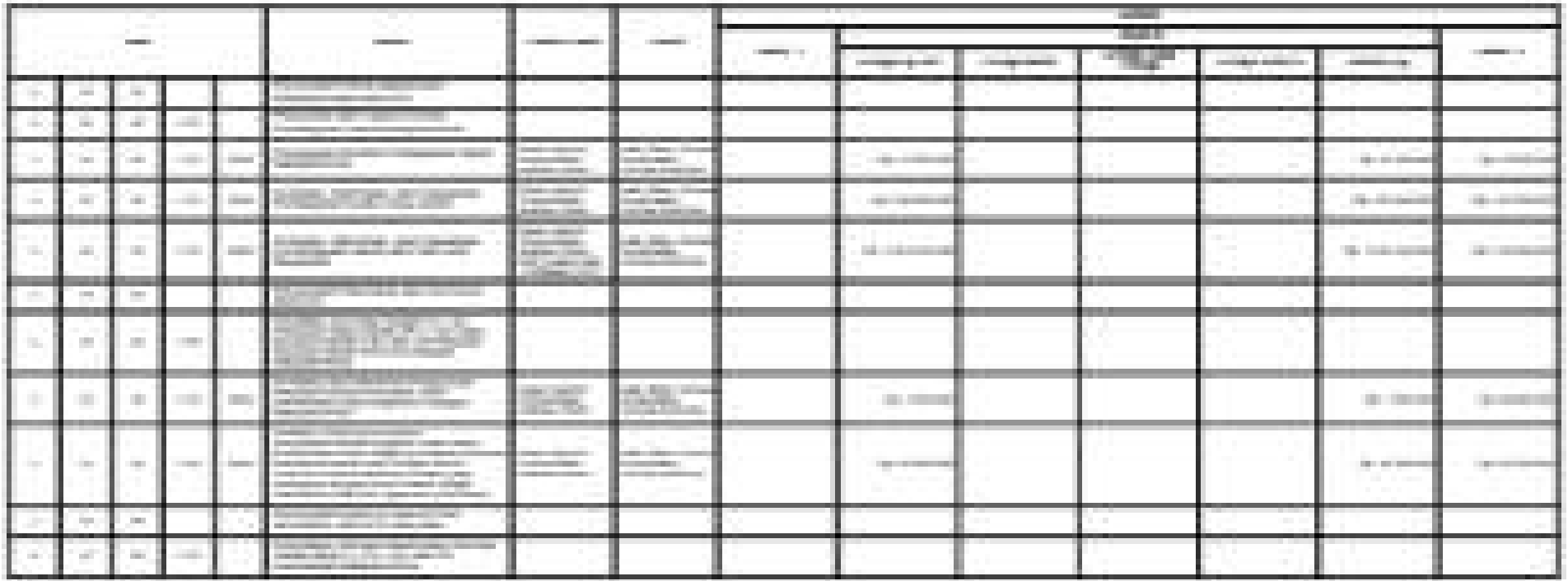
LAMPIRAN

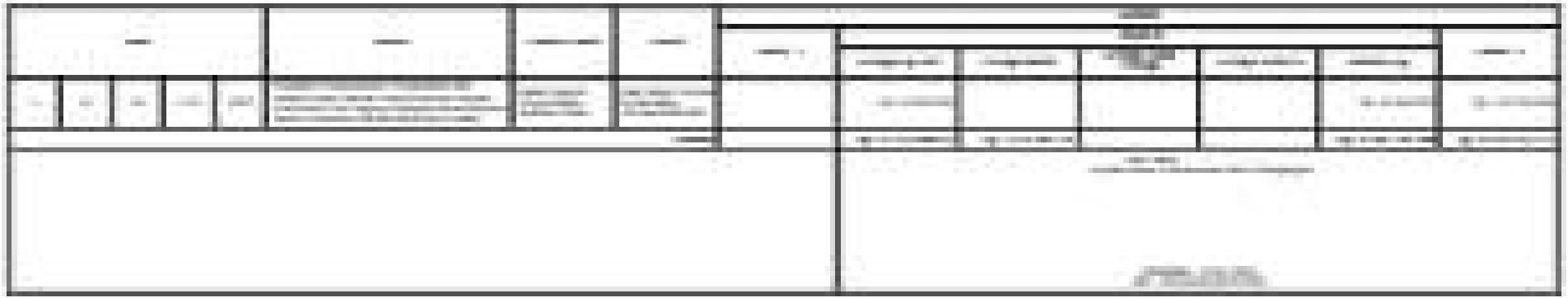
[illegible]











PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jalan Semeru 40 Nomor Telp. (0342) 808165 Fax. (0342) 809275
email : bappeda@blitarkab.go.id / website : www.bappeda.blitarkab.go.id

BERITA ACARA

PENYEPAKATAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024

Nomor : 8/050-03-04/2024/108.3.1/2024

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Tiga**, bulan Juni, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami masing-masing :

1. Nama : Dra. TIEN MUSTIKOWATI
   NIP : 19671213 199303 2 008
   Jabatan : Perencana Ahli Muda Bappedalitbang
   selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.
   NIP : 19741206 199903 2 002
   Jabatan : Perencana Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan
   selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan :

1. Penyepakatan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD 2024, sebagaimana terlampir;
2. Lampiran sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Blitar, 3 Juni 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.	Dra. TIEN MUSTIKOWATI
Pembina	Penata Tingkat I
NIP. 19741206 199903 2 002	NIP. 19671213 199303 2 008

Mengetahui,
Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi,

ELIN ROHWANINGSIH, ST., MT
Penata Tingkat I
NIP. 19820803 200902 2 005

Lampiran I
Nomor Surat : 005.01/04/Bapp/VI/2024
Tanggal : 3 Juni 2024

Target Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor (%)	6,73	6,82	6,16	2,32**	6,16	6,20	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW I 2024 (Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motor dan Sepeda Motor Kab. Biltar 2,02%. Kondisi ekonomi pada akhir tahun 2024 diprediksi tetap tumbuh lebih baik thd tahun 2023 dengan digelarnya pilkada serentak
2	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	7,92	8,11	5,35	5,35	5,40	5,45	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW I 2024 Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kab. Blitar adalah 5,35%. Pertumbuhan ekonomi diprediksi positif pada tahun 2024 dan 2025 karena adanya pilkada serentak

Target Indikator Kinerja Kunci RKPD Tahun 2026 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2026	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Urusan Perdagangan								
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas (%)	10	30	107,2	na	5,87	9,87	Disperindag	Pertumbuhan nilai ekspor yg sangat tinggi pd 2023 karena adanya ekspansi pasar CV Dinasty Bloswen, pada tahun ini belum ada tujuan ekspansi lagi sehingga target RPJM perubahan dan 2025 diproyeksikan berbasis data pada anggaran DPA dan RPJMD 2024 sebesar 5,87%
2	Tertib Usaha (Rekomendasi)	4	4	10	2	4	4	Disperindag	*Rata-rata Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB Kab. Biak dari 2019-2023 sebesar 14,32%
3	Persentase Barang Beredar yang dinilai yang sesuai dengan ketentuan perundangan (%)	60	75	85,88	na	85,88	85,88	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
4	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	60	90	86,89	na	86,89	86,89	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	50	75	56,67	na	75,67	82,35	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	60	75	86,67	86,67	69,67	83	Disperindag	Dari 13 pasar yang dikelola Disperindag diantaranya 9 pasar tradisional (Wiru), (sentra, Kampung Sinergi, Kesehatan, Kademangan) & pasar darurat/sipiv beroperasi efektif dalam kurun waktu tahun 2024
B	Urusan Perindustrian								
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (%)	2	2	5,35	5,35**	5,40	5,45	Disperindag	Informasi hasil analisis dari BPS pd TW 1 2024 pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan 5,35% karena lonjakan aktivitas industri pengolahan makanan minum

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
		2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									Pemotongan dan penyaluran Lebaran namun masih dimungkinkan turun pada TW selanjutnya
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB (%)	16	17	14,61	n/a	14,32	14,91	Disperindag	Rata-rata Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB Kab. Biltar dari 2019-2023 sebesar 14,32%
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Rupiah)	4.750	5.175	23.152	n/a	24.320	26.032	Disperindag	Capaian kinerja 2023 telah melampaui target RPJMD
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Orang)	49.980	51.948	54.135	55.240	57.321	58.142	Disperindag	Jumlah tenaga kerja sektor industri bertambah seiring dengan pertambahan jumlah industri
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Juta Rupiah)	115.540	118.950	137.613	145.507	161.002	162.248	Disperindag	Nilai investasi sektor industri bertambah seiring dengan dengan pertambahan jumlah industri

Target Indikator Kinerja Program RKPD Tahun 2025 dan P-RKPD Tahun 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYESUAIAN
			2024	2025	2023	MEI 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penyiapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	99,65	12,5	99,66	100	Disperindag	Pada tahun 2024 belum bisa melakukan penghitungan IKK tahun berjalan
		2. Opini pertumbuhan wirausaha daerah (%)	5	6	-0,99	-0,33	0,77	1,2	Disperindag	Target Opini pertumbuhan wirausaha daerah merujuk pada Undang-Undang (UU) No. 1 Th. 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, visi pengerangan

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (2) (3)		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG PENYELENGGARAAN
			2024	2025	2023	4S) 2024	5=6%*(2)*(4)	6=6%*(3)*(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Masih pemungutan PAD dari Tera Ulang sesuai tahun 2021, 2)Pemungutan retribusi pasar ini optimal ini pasar Kewarden belum dibangun dan Pasar Pabuh belum beroperasi normal.
3	Program Pembinaan s Dan Pengembangan Industri	Persentase Perkembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri (%)	90	100	12	3	100	100	Disperindag	Dari 4x Rancangan RPK telah ditetapkan oleh Biro Hukum Prov. Jatim, ditingkatkan dapat ditetapkan sebagai Perda tahun 2024
7	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan Terhadap Jumlah Permohonan yang Masuk (%)	100	100	100	120	110	120	Disperindag	Jumlah rekomendasi teknis perizinan terhadap yang diterbitkan sesuai dengan jumlah permohonan yang masuk
4	Program Pengembangan Sistem Industri	Persentase Rekomendasi Teknis Perizinan Industri yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Permohonan yang Masuk (%)	100	100	100	120	110	120	Disperindag	Jumlah rekomendasi teknis perizinan usaha industri yang diterbitkan telah terkait dengan jumlah permohonan yang masuk
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat Pengaduan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (%)	80	80	100	40	80	80	Disperindag	Ada proses hasil pembinaan sesuai pasar telah desa dimanfaatkan sesuai kawasnya pada tahun tersebut
6	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Peningkatan Pemanfaatan Informasi Industri (%)	0,02	0,03	4,11	1,04	2,26	2,09	Disperindag	Pada masa pandemic Covid-19 Pemerintah membatasi kegiatan kerumunan dan awam tsb sehingga banyak usaha pasar, Pada masa recovery dan tahun tahun berikutnya [illegible] normal seperti sebelum pandemi
7	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (%)	71	72	66,67	66,67	66,67	83	Disperindag	Dari 13 pasar yang dikelola Disperindag dikawasan 2 pasar pantauan (Wlingi, Lodoyo, Kanigoro, Talun, Resurmen, Kademangan), 4 pasar diantaranya tersedia stand sesuai kuota pada 2024

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERANGKAT DAERAH	LATAR BELAKANG/ PENTEGASAN
			2024	2025	2023	Wild 2024	Fiscal 2024	Fiscal 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk yang Di	30	30	177.2	44	0.87	0.87	Dispenperindag	Perkembangan nilai ekspor uji sengan tinggi di 2023, bahwa sebanyak ekspornya pasar DI Danny Bhakerti, pada tahun ini sekian nilai laporan ekspornya agi sehingga target 2024 (realisasi dan 2025 menyesuaikan berdasarkan rata-rata pajak tinggunan DPH dan RPJMD 2024 sebesar 8,87%.
2	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengaduan Jumlah UTTP yang Diuji dengan Kelebihan Penandang Undergan (%)	70	75	4.44	28.05	20.00	6.23	Dispenperindag	Dilakukan pemantauan pelaporan pengaduan konsumen. Target RPJMD ditetapkan sebesar 70% dengan realisasi tahun sumber realisasi capaian tercatat sebesar 4,44%. Pada tahun 2024 ditargetkan 20% MENJADI realisasi tahun n dikurangi realisasi n-1 dibagi realisasi n-1 dikalikan 100% Target ditetapkan sebesar 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa Pribadi dan BKNP bisa dimasukkan agi kebijakan kompensasi dari UTTP. 2. Regulasi Pertanian berupa Pemerintah (BB) berubah mengakibatkan banyak hasil UTTP yang tidak digunakan lagi (tidak perlu diteliti). 3. Perkembangan penggunaan timbangan elektronik yang menggantikan timbangan manual, dengan cara akurasi waktu (2-3)

NO.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET RPJMD		REALISASI		TARGET		PERMASALAHAN DAERAH	LATAR BELAKANG PENYIMPANGAN
			2024	2026	2023	MEI 2024	P-APBD 2024	RKPD 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Program Penggunaan Dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri	Persentase Belanja Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten (%)	75	75	66,83	14,79	67	68	Disamping	Indikator ini dihitung dari pemantauan belanja produk dalam negeri di Kabupaten yang telah dilaporkan

Pihak Kedua,

NAWANG WIDYAWATI, S.Hut., M.M.
Pembina
NIP. 19741206 199903 2 002

Pihak Pertama,

Dra. TIEN MUSTIKOWATI
Pelaita Tingkat I
NIP. 19671213 199303 2 008

Mengetahui,
Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi,

ELIN ROHMANINGSIH, ST., MT
Pelaita Tingkat I
NIP. 19830003 200904 2 005